

ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT PADA SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E) (Studi Pada Bank Jatim Cabang Pacitan)

Mafriana Wahyuningtyas
Kertahadi
Dwiatmanto
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Mafriana.wahyuningtyas@gmail.com

Abstract:

In the credit submission process, there is a system and procedure of credit which simplify the credit administration as well as the fulfilled requirement. This research is aimed to recognize the system and procedure of Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) credit administration as well as the credit control in the system and procedure of Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) credit administration. Descriptive qualitative research is the method which is used in this research. Based on the data analysis, the system and procedure of Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) credit administration has been conducted properly based on the rules defines and the clearly responsibility of each part. However, there are few lacking findings, namely the double job desk that cause misuse authority, no assessor appraisal, and no surprised audit yet. The suggestion are it supposed to be conducted a job desk division among the Credit Analysis and Credit Administration division to avoid the double job desk, establishing an appraisal assessor division that particularly officiates to conduct On The Spot and assesing appraisal and also applying surprised audit in order to build the readiness of employee and conducting the job desk appropriately.

Key words: *The System and Procedure of Credit Administration, Credit Control, KKP-E Credit*

Abstrak :

Dalam proses pengajuan kredit terdapat sistem dan prosedur kredit yang memudahkan dalam pemberian kredit serta lebih jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta untuk mengetahui pengendalian kredit pada sistem dan prosedur pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis data maka sistem dan prosedur pemberian KKP-E telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan jelas dalam tanggung jawab masing-masing bagian, namun ada beberapa temuan yang masih kurang yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan wewenang, belum adanya petugas penilai jaminan, serta belum adanya pemeriksaan mendadak. Saran yang diberikan adalah sebaiknya dilakukan pembagian tugas lagi antara bagian Analis Kredit dan Administrasi Kredit untuk menghindari perangkapan tugas, dibentuk bagian Penilai Jaminan yang bertugas khusus melakukan *On the Spot* dan menilai Jaminan, serta diadakan pemeriksaan mendadak agar karyawan siap setiap saat dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci : *Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit, Pengendalian kredit, Kredit KKP-E*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Usaha di Indonesia khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, dan kelautan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang secara tidak langsung berperan dalam memajukan

perekonomian negara. Dalam pendirian sebuah usaha permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat yaitu penyediaan sumber modal. Sumber modal tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan layanan kredit pada bank

dengan bunga yang rendah, atau kredit yang bersubsidi yang memang ditujukan untuk program usaha tertentu. Pengertian Bank sendiri menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Jatim Cabang Pacitan adalah salah satu lembaga perbankan diantara banyak bank yang memberikan layanan berupa simpanan dan juga kredit bagi masyarakat baik bagi perorangan ataupun pengusaha untuk modal kerja baik pengusaha besar, menengah, ataupun pengusaha kecil. Bentuk layanan kredit yang diberikan salah satunya yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). KKP-E merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

Pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu melalui prosedur yang sistematis. Proses yang dilakukan mulai dari pengajuan kredit kepada bank untuk selanjutnya dilakukan analisis kredit sampai dengan supervisi kredit. Tujuan dilakukan analisis kredit tersebut yaitu untuk menilai kelayakan permintaan kredit baru yang diajukan, hal ini sangat penting agar kredit akan diberikan dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem dan prosedur kredit yang dijalankan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengatur serta menjadi pedoman dalam pemberian kredit.

Permasalahan yang terdapat dalam prosedur pemberian kredit diantaranya perangkapan fungsi pekerjaan sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang khususnya dalam penanganan kredit. Masalah lain yang sering timbul dari adanya kredit yaitu terjadinya kredit macet yang pada akhirnya akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan bank itu sendiri. Besarnya resiko kredit ditunjukkan oleh *Non Performing Loans* (NPL) dalam laporan keuangan bank yang menunjukkan banyak sedikitnya debitur yang tidak dapat membayar kreditnya secara terus-menerus. NPL menurut Firdaus (2011, 149) yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), Kualitas diragukan (D), dan kualitas macet (M). Berikut ini merupakan laporan *Non Performing Loans* (NPL) dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. *Non Performing Loans* Bank Jatim Cabang Pacitan Tahun 2013-2014 (dalam jutaan rupiah)

Bank Jatim Cabang Pacitan	Periode	
	2013	2014
1. Kurang lancar	582	611
2. Diragukan	1.008	868
3. Macet	7.348	8.811
Jumlah kredit bermasalah	8.989	10.291
<i>Non Performig Loans</i> (NPL)	1.70%	1.66%

Sumber : Bank Jatim Cabang Pacitan, 2014

Masalah dalam perkreditan seperti tunggakan menyebabkan tingginya tingkat *Non Performing Loans* (NPL) dikarenakan adanya pengelolaan kredit yang kurang efektif, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam pengelolaan kredit yang telah ditetapkan. Pengelolaan kredit yang kurang efektif dapat disebabkan adanya pelaksanaan pengendalian kredit yang kurang baik, sehingga menyebabkan tingkat NPL meningkat. Masalah tersebut erat kaitannya dengan sistem yang digunakan dalam kredit, sehingga sistem yang digunakan perlu adanya perbaikan.

Pengendalian kredit sendiri merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kredit yang diberikan agar tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Hasibuan, 2008:105). Pengendalian kredit dalam prosedur pemberian kredit pada bank dapat dilihat dari enam unsur pengendalian kredit menurut Tawaf (1999:280) yaitu, 1) pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya; 2) pengendalian adanya pemisahan tugas; 3) pengendalian prosedur otorisasi yang tepat; 4) pengendalian dokumen catatan yang memadai; 5) pengendalian kontrol aktiva dan catatan; 6) pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen.

Pengendalian kredit dalam pemberian kredit pada bank dapat menghindarkan bank dari penyalahgunaan wewenang dan terjadinya peningkatan NPL. Kredit merupakan layanan dan jasa bank yang penuh dengan risiko maka selain melaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, bank

juga memerlukan sebuah pengendalian kredit dalam pemberian kredit. Pengendalian kredityang memadai dapat membantu menghindarkan bank dari praktik-praktik yang tidak sehat dan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT PADA SISTEM DAN PROSEDURPEMBERIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)” (STUDI PADA BANK JATIM CABANG PACITAN).**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Definisi dari sistem sendiri adalah suatu jaringan prosedur dengan pola terpadu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan inti dalam organisasi (Mulyadi, 2008:5). Sedangkan pengertian Prosedur adalah suatu pekerjaan yang berurutan dengan melibatkan beberapa orang yang digunakan untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi yang sering terjadi (Cole dalam Baridwan, 2002:3). Pengertian sistem dan prosedur tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan jaringan dari prosedur yang terpadu dan saling berhubungan untuk melaksanakan kegiatan inti yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang digunakan untuk menangani kegiatan yang sering terjadi.

2. Pengertian KKP-E

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi atau KKP-E merupakan kredit yang disediakan oleh Bank Jatim untuk kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Kredit tersebut ditujukan untuk Kelompok/Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Koperasi. Sedangkan untuk bidang yang dituju adalah bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.

Besarnya plafon individual KKP-E ditetapkan dengan memperhatikan Kebutuhan Indikatif dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bidang Pertanian:

1. Perorangan maksimal Rp 100 juta.
2. Koperasi/kelompok tani dan/atau Gapoktan untuk Pengadaan pangan maksimal Rp 500 juta,
3. Kelompok tani untuk pengadaan/peremajaan alat dan mesin dalam usaha mendukung pengembangan

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan maksimal Rp 500 juta.

b. Bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Perseorangan baik nelayan atau pembudidaya ikan maksimal Rp 100 juta,
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)/Koperasi paling banyak Rp 500 Juta digunakan untuk kegiatan usaha: Pengadaan pangan di bidang perikanan; Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan.

Persyaratan umum yang ditetapkan oleh Bank Jatim yang wajib diserahkan calon debitur adalah :

- a. Untuk perorangan dan masing-masing pengurus Koperasi dan Kelompok Usaha (termasuk anggota kelompok) wajib menyerahkan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM).
- b. *Foto copy* bukti kepemilikan agunan tambahan.
- c. *Foto copy* NPWP untuk permohonan kredit diatas Rp. 50.000.000,00 atau penambahan kredit hingga plafond kredit diatas Rp. 50.000.000,00 kecuali permohonan kredit dalam bentuk kelompok yang plafond kredit masing-masing anggota kelompok di bawah Rp. 50.000.000,00.

3. Pengertian Pengendalian Kredit

Pengembalian kredit oleh nasabah terhadap bank harus tetap lancar dan produktif. Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belak pihak (Hasibuan, 2008:105). Tawaf (1999:270) menjelaskan, “pengendalian intern terhadap pemberian kredit terdiri atas aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit.” Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pengendalian kredit merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga kredit yang diberikan agar tetap lancar, produktif, dan tidak macet dengan memperhatikan aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit.

Unsur-unsur pengendalian khususnya pada sistem pengendalian kredit merupakan unsur yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari pengendalian itu sendiri. Tawaf (1999:280) terdapat unsur-unsur pengendalian kredit yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
- b. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas.
- c. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat.
- d. Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai.
- e. Aspek pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan.
- f. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, dan memaparkan secara apa adanya. "Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya" (Sukmadinata, 2006:72).

Berikut ini merupakan hal-hal yang akan dianalisis pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem dan prosedur pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) pada Bank Jatim Cabang Pacitan.
 - 1) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat Permohonan
 - 2) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat penelitian berkas investasi informasi bank.
 - 3) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat analisis kredit.
 - 4) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat keputusan kredit.
 - 5) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat pencairan kredit.
 - 6) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat supervisi kredit.
 - 7) Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur KKP-E pada saat penyelesaian kredit.
- b. Menganalisis pelaksanaan pengendalian kredit pada sistem dan prosedur pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) pada Bank Jatim Cabang Pacitan yang meliputi unsur-unsur kredit sebagai berikut :

- 1) Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.
- 2) Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.
- 3) Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.
- 4) Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.
- 5) Aspek pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.
- 6) Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen, yaitu pada saat permohonan, saat analisis, saat proses penarikan, dan saat monitoring.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Pada sistem dan prosedur pemberian KKP-E oleh Bank Jatim masih terdapat kelemahan dan perlu diperbaiki diantaranya yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dilakukan oleh Analis Kredit yaitu sebagai analisis kredit dan sebagai penilai jaminan. Penilai Jaminan seharusnya dilakukan oleh petugas yang berbeda dan independen dan ahli dalam bidangnya, sehingga kekhawatiran akan adanya penyelewengan wewenang dapat dihindari. Selain itu, masih belum adanya pemeriksaan mendadak meskipun pemeriksaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini bertujuan agar para karyawan selalu mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak para karyawan telah siap.

2. Analisis Pengendalian Kredit pada Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

- a. Pengendalian Personel yang Kompeten dan Dapat Dipercaya

- 1) Pada saat permohonan kredit

Petugas Analis Kredit yang bertugas selain menerima permohonan kredit juga dapat memberikan informasi tentang prosedur, kebijakan, serta saran

mengenai fasilitas-fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan calon debitur. Petugas kredit sangat kompeten karena direkrut dengan sangat baik, yaitu melalui seleksi *Capeg* (Calon Pegawai) dan jalur *Outsourcing* yang disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan Bank Jatim Cabang Pacitan.

2) Pada saat Analisis

Petugas yang menangani analisis kredit yaitu Analis Kredit yang telah memiliki kemampuan untuk menganalisa kredit mulai dari kelengkapan dokumen, legalitas dan masa berlaku dokumen, pembahasan kredit, dan pengetahuan pada saat kunjungan langsung (*on the spot*) kepada calon debitur dalam rangka untuk memastikan usaha dan agunan calon debitur serta mengumpulkan dan memverifikasi data.

3) Pada saat Proses Penarikan

Petugas Analis Kredit merupakan petugas yang cakap dimana dalam proses penarikan kredit, sebelumnya mengurus kelengkapan dokumen guna pembuatan akta perjanjian kredit termasuk SPPK kemudian diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan pengikatan agunan. Analis Kredit juga mengetahui dengan jelas tentang sumber dana debitur yang tertuang dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) sehingga pihak bank mengetahui dengan jelas asal penyediaan dana dalam angsuran kreditnya.

4) Pada saat monitoring

Monitoring dilakukan oleh bagian Analis Kredit dan Supervisi Kredit. Analis Kredit memonitoring pelaksanaan kredit debitur dari laporan operasional kredit serta menjadi penasihat bagi debitur dengan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam kendala kredit yang dihadapi. Analis Kredit melakukan monitoring terhadap debitur apabila kredit debitur masuk dalam DPK (Dalam Perhatian Khusus) atau dalam kolektabilitas 2. Kredit debitur apabila sudah masuk kolektabilitas 3,4,5 maka

akan menjadi tanggung jawab Supervisi Kredit untuk memonitoring debitur yang bermasalah tersebut.

b. Pengendalian Adanya Pemisahan Tugas

1) Pada saat permohonan kredit

Pada Bank Jatim Cabang Pacitan belum mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena terjadi perangkapan tugas antara petugas penilai jaminan dengan petugas analisa kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit. Penilai jaminan seharusnya tidak dirangkap dengan petugas analis kredit namun dibentuk sendiri sebagai penilai jaminan. Pemisahan tugas tersebut mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan.

2) Pada saat analisis

Pengendalian kredit telah berjalan baik karena pada saat proses analisis kredit, rekomendasi tentang usulan kredit dari Analis Kredit diserahkan kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK). KPK menilai kembali hasil usulan kredit mengenai data-data informasi pemohon dari segi keabsahan, keakuratan, kewajaran dan kelengkapan untuk kemudian akan dilakukan putusan kredit.

3) Pada saat proses kredit

Pemberi otorisasi pencairan kredit dilakukan oleh KPK (Kelompok Pemutus Kredit) sedangkan yang melaksanakannya adalah *Teller*. Proses kredit telah melalui tahap-tahap yaitu mulai dari petugas bank yang memberikan otorisasi atas dilaksanakannya pencairan kredit dan petugas bank yang melaksanakan transaksi tersebut telah dilakukan oleh petugas yang berbeda.

4) Pada saat monitoring

Pada saat monitoring bagian Supervisi Kredit setiap bulan secara rutin mengumpulkan data mengenai laporan kolektabilitas debitur untuk selanjutnya diinformasikan kepada bagian Analis Kredit dan akan diberikan tindakan atas masalah yang terjadi. Analis Kredit membina hubungan baik dengan debitur dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur untuk mengetahui

kelangsungan usahanya serta untuk mengetahui apakah kredit yang telah diberikan digunakan dengan baik atau tidak.

c. Pengendalian Otorisasi yang tepat

1) Pada saat permohonan kredit

Pada saat proses permohonan kredit di Bank Jatim Cabang Pacitan telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai yaitu prosedur permohonan kredit dilakukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sesuai dengan buku pedoman bank. Syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk selanjutnya akan dilakukan analisis untuk dilakukan prosedur pemberian kredit berikutnya.

2) Pada saat analisis

Pengendalian kredit berjalan baik yaitu adanya pihak tertinggi bank yang melakukan otorisasi atas pemberian kredit disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Petugas bank yang memberikan keputusan pemberian kredit untuk yang pertama kali yaitu dilakukan oleh Analis Kredit pada saat analisis kredit. Hasil analisis kemudian diuji kembali oleh KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yang berwenang melakukan otorisasi atas keputusan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut.

3) Pada saat proses kredit

Pada saat proses penarikan kredit di Bank Jatim Cabang Pacitan telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai yaitu hanya pejabat bank yang memberikan otorisasi atas penarikan kredit debitur. Petugas Analis Kredit sebelumnya membuat bukti nota debit dan nota kredit yang diotorisasi oleh pejabat bank terdiri dari Pimpinan Cabang dan Penyelia Operasional Kredit, kemudian akan dilakukan oleh *Teller* dalam pelaksanaan penarikan kreditnya.

4) Pada saat monitoring

Pada saat monitoring bagian yang berwenang adalah Analis Kredit dan Penyelia Supervisi Kredit. Pemantauan yang dilakukan oleh Analis Kredit

dilakukan pada saat debitur dalam kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus). Supervisi Kredit melakukan pemantauan dengan cara membuat laporan kolektabilitas debitur secara rutin setiap bulannya untuk kemudian disampaikan kepada petugas analis kredit. Pada saat debitur masuk dalam kolektabilitas 3,4, dan 5 maka monitoring selanjutnya akan dilakukan oleh petugas Supervisi Kredit disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian kredit tersebut.

d. Pengendalian Dokumen catatan yang memadai

1) Pada saat permohonan kredit

Setiap dokumen dan catatan setiap transaksi telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena telah direkam secara sederhana dalam bentuk formulir serta dicantumkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit. Kelengkapan data tersebut dipenuhi termasuk formulir yang berisi tentang bukti pengajuan permohonan kredit yaitu Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dari Bank Jatim Cabang Pacitan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa calon debitur tersebut benar-benar mengajukan permohonan kredit.

2) Pada saat analisis

Dokumen yang digunakan telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena informasi yang diperoleh merupakan informasi yang lengkap mengenai calon debitur, yaitu data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis dan keputusan kredit bank telah terjamin keakuratan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya. Akan lebih baik apabila debitur yang ditolak permohonan kreditnya untuk diberikan Surat Penolakan Kredit agar calon debitur mengetahui alasannya secara tertulis sehingga lebih dimengerti dan dipahami.

3) Pada saat proses kredit

Bank Jatim Cabang Pacitan dalam hal dokumen dan catatan yang memadai saat proses penarikan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang

baik. Pada saat sebelum proses penarikan kredit terlebih dahulu dilakukan kelengkapan formulir-formulir untuk realisasi kredit, dan kelengkapan perjanjian kredit yang disesuaikan dengan keputusan Kelompok Pemutus Kredit (KPK), kelengkapan atas legalitas jaminan yang telah diserahkan kepada pihak bank, serta biaya-biaya yang terdiri dari biaya materai, provisi, dan administrasi yang harus dibayar oleh calon debitur.

4) Pada saat monitoring

Bank Jatim Cabang Pacitan telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik dilihat dari dokumen dan catatan yang memadai. Semua dokumen file perkreditan milik debitur baik dokumen jaminan maupun data mengenai debitur disimpan secara rapi dan aman oleh bagian Administrasi Kredit. Tempat penyimpanan dokumen tersebut sangat dijaga keamanannya terutama dokumen jaminan debitur dimana hanya petugas Administrasi Kredit saja yang berwenang untuk akses ke dalam.

e. Pengendalian Kontrol Fisik Aktiva dan Catatan

1) Pada saat permohonan kredit

Bank Jatim Cabang Pacitan dalam hal ini telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik dilihat dari kontrol fisik aktiva dan catatan. Permohonan kredit yang telah disetujui maka akan dilakukan pemeriksaan atau kunjungan lokasi (*on the spot*) atas usaha dan jaminan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mencocokkan antara catatan berdasarkan berkas calon debitur dan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kecocokan tersebut apabila telah dipenuhi untuk proses kredit selanjutnya didasarkan pada kondisi obyektif yang sebenarnya.

2) Pada saat analisis

Bank Jatim Cabang Pacitan dalam hal ini telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik dilihat dari kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat proses analisis kredit. Analisis Kredit menilai kelayakan kredit berdasarkan kunjungan baik di tempat usaha debitur maupun di

tempat jaminan, dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara awal yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

3) Pada saat proses kredit

Bank Jatim Cabang Pacitan dalam hal ini telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik khususnya pada kontrol fisik aktiva dan catatan. Pada saat proses penarikan kredit bagian Analisis Kredit melakukan pengecekan secara fisik dengan cara *on the spot* ke tempat usaha debitur untuk mengetahui penggunaan fasilitas kredit yang diberikan apakah digunakan secara baik atau tidak. Bagian Administrasi Kredit juga menyimpan dengan baik dan aman dokumen-dokumen yang dititipkan kepada pihak bank. Penyimpanan tersebut sangat aman karena tidak sembarang orang bisa mengakses tempat tersebut tanpa sepengetahuan Administrasi Kredit.

4) Pada saat monitoring

Bank Jatim Cabang Pacitan dalam proses monitoring telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai dilihat dari kontrol fisik aktiva dan catatan. Pada masa monitoring, bagian Analisis Kredit membina hubungan yang baik dengan debitur dengan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha debitur untuk melihat apakah kredit yang diberikan telah dimanfaatkan dengan baik dan usaha yang dijalankan dapat mengalami perkembangan.

f. Pengendalian Pemeriksaan yang Independen

Pemeriksaan intern kredit terhadap fungsi perkreditan harus dilakukan secara periodik dan proaktif dan bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya berkelanjutan dalam pengawasan kredit agar pemberian kredit yang dilakukan oleh bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim Cabang Pacitan, pengendalian perkreditannya sudah baik namun masih kurang karena meskipun sudah dilakukan pemeriksaan kredit secara teratur namun belum adanya pemeriksaan mendadak (*Surprised Audit*). Pemeriksaan yang selama ini dilakukan yaitu secara rutin dilakukan setiap bulan dengan jadwal yang teratur

sehingga karyawan telah mengetahui sebelumnya karena sudah hafal sehingga dapat mempersiapkan dirinya. Pemeriksaan tersebut akan berbeda apabila dilakukan pemeriksaan mendadak yang akan membuat karyawan setiap bagian akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan apabila ada pemeriksaan sewaktu-waktu para karyawan telah siap.

g. Sistem dan Prosedur Pemberian KKP-E yang disarankan.

1) Pada saat permohonan

Pada Bank Jatim Cabang Pacitan, permohonan kredit dimulai dari pengajuan berkas kredit yang diberikan langsung kepada bagian Administrasi Kredit. Berkas yang masuk akan di registrasi untuk selanjutnya akan diberikan kepada bagian Analis Kredit untuk diberikan analisa. Pada proses tersebut masih belum ada wawancara I yang dilakukan oleh Administrasi Kredit. Pada saat setelah dilengkapi berkas-berkas kredit yang disyaratkan seharusnya dilakukan wawancara I dengan calon debitur secara langsung untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai, lengkap serta keabsahannya. Wawancara I yang dilakukan harus dilaksanakan secara rileks agar hasil wawancara dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2) Pada saat analisis kredit

Pada saat proses analisis kredit tersebut seharusnya dibedakan antara penilai jaminan dengan analisis kredit. Analis Kredit seharusnya hanya melakukan analisis kredit, setelah sebelumnya bagian Penilai Jaminan melakukan kunjungan lokasi agunan. Kedua bagian tersebut harus ada karena jika penilai jaminan dilakukan oleh bagian Analis Kredit maka dikhawatirkan terjadi penyelewengan wewenang. Bank Jatim seharusnya membuat bagian sendiri untuk penilai jaminan dimana di dalamnya terdapat karyawan yang kompeten dan mengerti di bidangnya. Sementara itu pada proses pemberian putusan kredit oleh KPK, apabila kredit yang diajukan ditolak, yaitu belum adanya surat penolakan kredit yang dikeluarkan oleh bank, namun hanya diberikan informasi terkait penolakan serta alasannya dengan pengembalian berkas kredit yang pernah diajukan sebelumnya.

3) Pada saat proses penarikan kredit

Pada Bank Jatim Cabang Pacitan, proses penarikan kredit dilakukan oleh Teller sebagai pihak yang melaksanakan sedangkan yang memberikan otorisasi adalah pejabat tertinggi bank yaitu Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yaitu Pimpinan Cabang dan Bagian Operasional Kredit. Nota debit dan nota kredit yang dikeluarkan oleh bagian Analis Kredit dibuat rangkap 3, yang pertama untuk Penyelia Akuntansi, dan untuk Teller. Atas adanya nota tersebut sebagai formulir yang digunakan untuk realisasi kredit.

4) Pada saat monitoring

Pada Bank Jatim Cabang Pacitan, pada proses monitoring yang melakukannya adalah Bagian Analis Kredit dengan Penyelia Supervisi Kredit. Bagian Analis Kredit menjalin hubungan baik dengan debiturnya dengan melakukan kunjungan setempat pada usaha yang dijalankan khususnya apabila debitur tengah mengalami masalah dalam kreditnya. Sementara itu Bagian Supervisi Kredit rutin melakukan pengawasan dengan membuat laporan operasional kredit khususnya pada kredit-kredit bermasalah. Masalah kredit yang masuk dalam kolektabilitas 3,4,5 maka akan menjadi tanggung jawab bagian Supervisi Kredit untuk memberikan monitoring.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengendalian personel yang kompeten dan dipercaya
 - a. Pada saat permohonan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena petugas yang menangani telah memiliki kemampuan yang memadai dan mengerti syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur.
 - b. Pada saat analisis kredit petugas memiliki pengetahuan, sikap objektif, jujur, dan dapat dipercaya pada saat meneliti mengenai kelengkapan, keabsahan, dan saat *on the spot*.
 - c. Pada saat penarikan kredit petugas telah memiliki pengetahuan mengenai pengikatan jaminan dan penguasaan jaminan kredit serta asal dana sehingga

- terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya.
- d. Pada saat monitoring petugas juga telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena mampu memahami riwayat angsuran debitur kemudian memiliki inisiatif untuk memecahkan permasalahan kredit tersebut.
3. Pengendalian adanya pemisahan tugas
 - a. Pada saat analisa kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi yaitu Kelompok Pemutus Kredit.
 - b. Pada saat penarikan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit dengan yang melaksanakannya telah dilakukan oleh petugas yang berbeda.
 - c. Pada saat monitoring telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena bagian Supervisi Kredit yang mengelola laporan angsuran debitur serta melaporkannya kepada Analis Kredit dimana Analis Kredit membina hubungan baik dengan debitur.
 4. Prosedur otorisasi yang tepat
 - a. Pada saat permohonan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena prosedur permohonan kredit dapat dilakukan jika semua syarat telah lengkap dan sesuai prosedur.
 - b. Pada saat analisa kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena telah memperhatikan adanya wewenang pm=emutusan kredit.
 - c. Pada saat penarikan kredit yang berwenang dalam memberikan otorisasi pada saat penarikan kredit adalah pejabat tertinggi yaitu Kelompok Pemutus Kredit.
 - d. Pada saat monitoring telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena prosedur dalam monitoring telah dilaksanakan oleh petugas bank yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 5. Dokumen catatan yang memadai
 - a. Pada saat permohonan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena petugas mengecek kembali kelengkapan data permohonan kredit debitur.
 - b. Pada saat analisis kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik karena analisa kredit berdasarkan data/informasi yang lengkap dari debitur.
 - c. Pada saat penarikan kredit telah mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena kelengkapan dan standarisasi perjanjian kredit disesuaikan dengan keputusan Kelompok Pemutus Kredit.
 - d. Pada saat monitoring semua dokumen kredit milik debitur tersimpan rapi dan aman pada bagian Administrasi Kredit.
6. Kontrol fisik aktiva dan catatan
 - a. Pada saat permohonan kredit, pemeriksaan di tempat atas usaha debitur maupun jaminan kredit telah dilakukan.
 - b. Pada saat analisis kredit, analisis kredit berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat usaha debitur dan jaminan kreditnya.
 - c. Pada saat penarikan kredit, dilakukan pengecekan secara fisik ke tempat debitur untuk mengetahui apakah fasilitas kredit yang diberikan telah digunakan dengan baik atau tidak.
 - d. Pada saat monitoring, telah dilakukan ricek antara hasil laporan angsuran debitur dengan pemeriksaan di tempat debitur.
- Disamping beberapa kelebihan yang telah diuraikan terkait dengan pengendalian kredit tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dalam aktivitas pengendalian kredit pada Bank Jatim Cabang Pacitan yaitu :
1. masih terdapat pelaksanaan tugas yang tumpang tindih antara petugas Analis Kredit dengan petugas Administrasi Kredit. Petugas Analis Kredit seharusnya hanya melaksanakan fungsi sebagai analis kredit namun disini juga merangkap fungsi administrasi kredit yaitu dengan mengurus kelengkapan berkas-berkas untuk realisasi kredit. selain itu, adanya perangkapan fungsi sebagai penilai jaminan dengan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh petugas Analis Kredit sehingga dapat melemahkan pengendalian intern pada prosedur pemberian KKP-E.
 2. Belum memiliki fungsi sebagai petugas penilai jaminan yang ahli dalam bidang penilai jaminan khusus dalam melaksanakan penilaian jaminan.
 3. Pemeriksaan oleh auditor cabang sifatnya rutin dan teratur, dan belum ada pemeriksaan mendadak, sehingga bagian yang akan diperiksa dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu.

2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan antara lain :

1. Pemisahan fungsi yang tegas antara petugas Administrasi Kredit dengan petugas Analisis Kredit yaitu Analisis Kredit berfungsi sebagai pihak yang menganalisis kredit debitur sedangkan petugas Administrasi Kredit berfungsi untuk mengurus dan melengkapi berkas-berkas terkait dengan kegiatan perkreditan.
2. Penambahan fungsi Penilai Jaminan sebagai penilai/petugas taksasi jaminan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) oleh auditor cabang maupun dari auditor pusat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan secara rutin namun dengan jadwal yang tidak teratur agar hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi (Penyusunan, Prosedur, dan Metode)*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjukria, Tawaf P. 1992. *Auditing Intern Bank*. Jakarta: Salemba Empat